

# Krisis Pangan Akarnya Krisis Keyakinan Politik Pangan



AGUS  
PAKPAHAN

**K**risis pangan, benarkah baru sekarang kita hadapi? Apa yang kita maksud dengan krisis pangan itu? Apakah krisis karena tidak ada beras? Atau krisis karena masyarakat tidak bisa membeli beras? Atau krisis petani yang pembuat pangan tak terangsang untuk berproduksi? Atau krisis karena kita mengimpor beras yang makin meningkat?

Krisis pangan di Indonesia saya pikir sudah berlanjut sejak lama apabila diukur berdasarkan kemampuan mengatasi ketidakpastian akan kapasitas bangsa memberikan pangan bagi rakyatnya. Perlu kita bedakan antara produksi pangan dengan kapasitas produksi pangan. Kapasitas menggambarkan kemampuan produksi baik digunakan atau tidak. Karena itu kapasitas tidak tergantung pada harga atau pasar. Adapun produksi pangan adalah hasil riil pangan dari proses produksi yang dijalankan per satuan waktu.

Kesulitan Indonesia dewasa ini selain produksi pangan di dalam negeri tidak mencukupi sehingga impor pangan diperlukan, kapasitas produksi juga terancam sebagaimana diperlihatkan oleh perlunya mencetak sawah-sawah baru atau areal pertanian baru lainnya, yang ternyata untuk menemukan lahannya saja tidaklah mudah.

Krisis pangan adalah akibat. Penyebabnya adalah karena kita merupakan bangsa yang mengalami krisis keyakinan. Thailand membatalkan ekspor berasnya karena harga yang diberikan kepada kita oleh Pemerintah Thailand sebelumnya dianggap terlalu rendah. Apa referensinya? Pemerintah Thailand yang baru menyatakan bahwa petani mereka ingin lebih tinggi lagi pendapatannya. Mereka tahu dengan nalarnya bahwa beras itu komoditas yang sifatnya inelastik terhadap perubahan harga. Artinya, pendapatan petani hanya naik kalau harga naik. Thailand yakin bahwa perbuatan itu merupakan langkah terbaik mengingat Thailand selalu berpegang pada keyakinan bahwa pertanian itu bidang pekerjaan yang selain mulia juga menguntungkan bangsa dan negara Thailand secara ekonomi.

Keyakinan semacam ini juga sudah berlaku sejak lama di Jepang. Pada tahun 1600an awal, Jepang merestrukturisasi tatanan masyarakatnya ke dalam empat strata: Samurai, petani, industriawan dan pedagang. Nalar yang berlaku di Jepang itu hidup hingga kini, yaitu pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang melandasi semua kegiatan masyarakat lainnya, wa-

laupun secara lahiriah jumlah petani Jepang tinggal sekitar 2 persen dari penduduk Jepang dan kontribusinya terhadap PDB Jepang hanya tinggal sekitar 1 persen. Kalau Jepang menggunakan nalar linear sederhana, maka petani dan pertanian sudah menjadi kegiatan ekonomi yang dukumuhkan.

Nalar kita keliru: menempatkan pertanian sama dengan sektor perdagangan, industri, atau keuangan. Di mana kelirunya? Karena kita tidak mengenali hukum hirarki atau hukum urutan. Pertanian adalah produsen sedangkan kegiatan ekonomi di atasnya berlaku sebagai konsumen.

## Saling Berpasangan

Kita makan nasi: konsumen; perdagangan cari untung berjualan beras: konsumen. Industri tepung mengolah beras: konsumen. Bank mengenakan bunga kepada peminjam: konsumen. Apa yang diperdagangkan kalau tidak ada barang? Apa yang dimakan kalau tidak ada pangan? Tidak ada. Jadi ada hirarki dan urutan dalam proses pembangunan itu.



Dalam literatur kita juga mengenal istilah *seemingly contradictory opposite*, banyak hal yang tampaknya bertentangan, padahal pada kenyataannya ia saling berpasangan. Pertanian bukanlah lawan industri atau perdagangan; pertanian adalah pasangan sektor ekonomi lainnya. Siang bukan lawan malam dan perempuan bukan lawan laki-laki. Pandangan *supply vs demand*, janganlah dibaca secara keliru: pertentangan produsen dan konsumen, melainkan keduanya adalah saling berpasangan.

Cara pandang ini juga seharusnya telah lama kita tinggalkan. Kita jangan melanjutkan cara pandang "Tanam Paksa" peningkatan pemerintah Hindia Belanda, yang telah menyengsarakan rakyat kita, khususnya masyarakat perdesaan Pulau Jawa.

Apa yang harus dikerjakan agar pertanian menjadi pasangan sektor ekonomi lainnya dan petani menjadi pasangan pelaku ekonomi lainnya? Yang pertama adalah status sosialnya dalam alam pikiran dan perasaan para pemimpin dan rakyat Indonesia haruslah sama. Ini adalah faham demokrasi atau kerakyatan yang memang nilai-nilai yang diamanahkan oleh Pancasila

dan UUD 1945, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dari perkembangan pertanian pada umumnya selama ini, jelas kita telah keluar jalur dari amanah tersebut.

Untuk mencapai keyakinan di atas perbuatan melalui nalar saja tidak cukup. Siapa yang rela menyerahkan "kekuasaan" kepada pihak yang lemah? Nalar tak akan memberikan ruang untuk perubahan ini karena perubahan seperti ini tidak masuk akal. Jadi, faktor apa yang paling penting untuk terjadinya perubahan? Jawabnya hanya satu: kebesaran hati atau jiwa kita sebagai bangsa yang berasal dan masih berbasis agraris. Kita harus mencontoh Jepang atau Thailand dalam konteks kebesaran jiwa membela kepentingan petani, yang telah memberikan kesempatan hidup dan bergerak maju tetapi mereka masih berada di belakang.

Memang tidak ada yang lebih sulit daripada membangun keyakinan baru. Keyakinan yang sudah melembaga atau telah jauh lagi yang sudah membudaya, ia memerintah alam bawah sadar kita untuk melakukan perbuatan tanpa kita melakukan kalkulasi untung-ruginya terlebih dulu. Perubahan keyakinan ini adalah perubahan yang sifatnya revolusioner, perubahan yang sifatnya bukan yang sifatnya kontinu melainkan perubahan yang berpindah alurnya. Karena itu sekali keyakinan berubah, maka seluruh sistem akan berubah juga. Perubahan keyakinan akan melahirkan perubahan besar. Jangan lupa bahwa negara-negara yang sekarang maju itu pun dimulai karena perubahan dalam keyakinan bangsanya. Jangan pula kita lupa, Indonesia merdeka pun karena hidupnya keyakinan di dalam dada para pemimpin dan rakyat Indonesia: Merdeka atau Mati.

Krisis pangan yang sudah berlangsung sepanjang sejarah kita ini perlu kita ubah dengan memulainya membangun keyakinan politik pangan baru yang selalu diperkuat oleh daya nalar yang makin baik serta belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah mencapai kemajuan di bidang pangan ini. Penciptaan peraturan perundangan yang menguntungkan pertanian dan negara secara keseluruhan, pembangunan bendung dan sistem irigasi modern, pencetakan sawah-sawah baru, perbaikan sistem perdagangan, pengembangan industri berbasis pangan dan hal positif lainnya akan lahir dengan sendirinya, apabila keyakinan baru tersebut telah menjadi keyakinan yang hidup di dalam dada seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia. Dengan demikian kita mengartikan pembangunan sebagai pemerdekaan. "Development as Freedom", tulis Amartya Sen, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi 1998.

PENULIS ADALAH DEPUTI MENTERI BUMN BIDANG USAHA AGROINDUSTRI, KEHUTANAN, KERTAS, PERCETAKAN DAN PENERBITAN 2005-2010 DAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN 1998-2003

## SBY Panggil Calon Menteri ke Cikeas

dari halaman 1

Disinggung mengenai konflik perbatasan, dia mengungkapkan, Presiden tidak secara khusus membahas hal itu. "Yang ditekankan adalah bagaimana meningkatkan profil politik Indonesia di luar negeri," ujarnya.

Wardana, yang telah berkarier di Kementerian Luar Negeri selama 30 tahun, sebelumnya menjabat Dubes RI di Singapura selama empat tahun. Dia baru ditarik ke Indonesia empat bulan silam.

Kepastian Wardana menjadi Wamenlu juga disampaikan Sudi Silalahi. Hal itu karena Triyono Wibowo bakal mendapat tugas baru yang tak kalah penting. Namun, dia tidak menyebutkan tugas yang bakal dipercayakan kepada Triyono berikutnya.

Setelah bertemu Wardana, sekitar pukul 10.50 WIB, Presiden SBY memanggil Ali Ghufron Mukti. Tak lama kemudian pengusaha nasional pendiri Grup Para, Chairul Tanjung, sekitar pukul 11.10, juga tiba di kediaman Presiden di Puri Cikeas.

Seusai bertemu Presiden, Ali Ghufron mengungkapkan, dia ditugaskan menjadi Wakil Menteri Kesehatan. Sedangkan, Chairul Tanjung diproyeksikan menjadi Wakil Menteri BUMN.

Terkait reshuffle kabinet, informasi yang dihimpun SP menyebutkan, satu menteri koordinasi dan tujuh menteri akan diganti. Sejumlah menteri lain bakal digeser. Selain itu, Presiden dikabarkan akan menambah sejumlah wakil menteri.

## Presiden Berolahraga

Sebelum mengawali kegiatannya terkait reshuffle kabinet, Presiden SBY pada Kamis pagi berolahraga di kediamannya. Sekitar pukul 07.30 WIB, Presiden berjalan kaki sepanjang 2,5 km, dilanjutkan dengan bermain tenis meja melawan Komandan Grup A Paspampres, Kolonel Eko Margono. SBY berolahraga didampingi Ibu Ani Yudhoyono, para staf khusus Presiden, dan Paspampres.

## Golkar Tak Keberatan Jatah Partai Diganti Profesional

dari halaman 1

Muhamain disebut-sebut menjadi salah satu menteri yang kinerjanya buruk terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans).

Mengenai tujuan reshuffle untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, Marwan menyatakan sependapat dengan hal tersebut. Namun, menurutnya, perombakan kabinet tidak terkait dengan orang parpol atau profesional yang ditempatkan di kabinet.

"Peruma juga profesional ditempatkan, tapi tidak ada akselerasi dengan parlemen dan malah statis. Saya kira tidak ada dikotomi yang jadi menteri harus orang profesional atau partai karena banyak kok orang partai yang profesional," ujarnya.

Dia menegaskan, meskipun reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden, namun diharapkan sebelum diumumkan SBY terlebih dahulu membicarakan masalah tersebut dengan pimpinan parpol koalisi. "Kami yakin kalau reshuffle dilakukan, tentu sudah dengan pertimbangan matang dari presiden untuk meningkatkan kinerja kabinet dan pemerintahan untuk membawa perubahan lewat pembangunan," katanya. Hal yang sama disampaikan Sekretaris

Seusai bermain tenis meja Presiden mengajak wartawan sarapan pagi dengan menu nasi goreng dan bubur ayam. "Bubur ayam dan nasi goreng ini makanan sehat, karena bukan hanya dibuat dari beras tapi dicampur dengan ubi kayu," kata Presiden kepada wartawan.

Menurut Presiden, jika makanan ini dibudayakan akan baik bagi bangsa dalam upaya mengurangi kebiasaan atau tergantungan pada beras.

Setelah sarapan bersama, para wartawan kemudian disuruh ke luar dari rumah SBY. Wartawan disuruh menunggu di pos penjagaan pintu masuk rumah. Jarak antara rumah SBY dengan pintu penjagaan itu sekitar 100 meter.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sebelum mengikuti olahraga bersama SBY menolak memberi tahu kapan pengumuman reshuffle dilakukan. Ia tidak menjawab saat ditanya apakah pengumuman dilakukan Minggu (17/10) malam. "Kita tunggu saja," katanya singkat.

Di tempat terpisah, guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, JE Sahetapy menyatakan perombakan kabinet hanya suatu permulaan dan bukan tujuan akhir. Perombakan kabinet bergantung pada Presiden SBY, apakah akan memilih orang-orang yang tepat atau tidak. "Kalau menurut saya, kalau dia (Presiden SBY, Red) memilih orang-orang partai, tidak menyelesaikan (masalah, Red). Harus dipilih orang-orang profesional," tuturnya.

Kalaupun yang dipilih Presiden SBY adalah orang-orang profesional dari partai, menurut Sahetapy, tidak ada jaminan bahwa berbagai permasalahan akan selesai. "Jika yang dipilih bukan orang profesional maka permasalahan yang ada bisa tidak beres. Sebab biasanya, orang kalau sudah mempunyai komitmen dengan partai akan repot, terutama menyangkut masalah keuangan. Sebaliknya profesional," tegasnya. [R-14/D-12]

## SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email [opini@suarapembaruan.com](mailto:opini@suarapembaruan.com) atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

### Kerja Sama Pemberantasan Terorisme Harus Ditingkatkan

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kompleks, sehingga penanganannya harus dilakukan bersama-sama seluruh instansi terkait dan masyarakat. Kerjasama antar instansi penegak hukum dan intelijen harus sinergi agar hasilnya maksimal. Selama ini banyak pihak yang menilai diantara instansi masih berjalan sendiri-sendiri dalam menangani masalah terorisme.

Menteri Pertahanan Purnomo Yudiantoro, Presiden SBY memerintahkan aparat keamanan hingga di tingkat bawah untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini mendesak dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan, termasuk ancaman terorisme. Presiden memerintahkan agar aparat keamanan di tingkat bawah, di kodam dan sebagainya, lebih meningkatkan koordinasi mengantisipasi persoalan keamanan.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan BIN sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Polri tentang rencana aksi bom di Solo. Polri pun telah menindaklanjuti laporan itu. Dari hasil investigasi internal yang dilakukan Polri, dua petugas telah ditempatkan di Gereja Bethel Injil Sepuluh (GBIS) Kepunton, Solo.

Soal audit investigasi, di dalam proses informasi intelijen sudah ditindaklanjuti oleh kewilayahan dengan membuat yang namanya rencana kegiatan. Jadi Polri setiap melaksanakan tugas, setiap hari membuat yang namanya rencana kegiatan.

Kadiv Humas Ijren Pol Anton Bahrul Alam mengatakan Polri masih mendalami keterkaitan antara bom Solo dengan bom Ambon. Polri masih menengarahi ada satu kelompok di Ambon yang kini sedang aktif bergerak. Setelah Solo itu terjadi beruntun di Ambon. Itu patut kita fokuskan dan ternyata bom-bom yang ada di Ambon bentuknya sama. Jadi selama kejadian itu dua yang tidak meledak, coba kita urai.

Semua modelnya sama, artinya ada satu kelompok lagi di Ambon yang sedang bermain. Itu kita dalam terusan kelompoknya siapa. Membenarkan ada informasi dari intelijen soal bom Solo. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan intelijen atas informasi itu. Setiap informasi yang masuk ke kita, kita tindaklanjuti. Informasi dari intelijen dicek terlebih dahulu kebenarannya. Jika informasi itu benar, maka dapat dijadikan alat bukti. Justru kita dapat informasi dari BIN yang bisa dijadikan alat bukti. Selama ini kita koordinasi. Sementara itu soal DPO Solo sebanyak 4 orang, pihaknya tidak bisa membuka 'kartu nama' DPO tersebut. Pihaknya masih mengejar DPO tersebut. Ya nanti kalau kita buka kabar orangnya. Kita nggak tahu di mana orangnya tapi kita kejar. Posisi di mana tidak bisa kita sampaikan ke publik.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Densus 88 selalu menjadi andalan Polri untuk menghancurkan jaringan teroris di Indonesia. Berbagai prestasi pun telah ditorehkan Densus 88. Namun Densus juga diingatkan untuk tidak merasa paling jagoan dan paling penting, karena hal ini dapat menghambat sinergi di tubuh Polri sendiri.

Sinergi antara Densus, Intelkam Polri, TNI dan BIN dalam memerangi teror harus selalu ditingkatkan. Arogansi ini yang harus dikikis. Kerjasama harus terus ditingkatkan.

Saya berharap dalam penanggulangan masalah terorisme ini semua pihak bisa bekerjasama, sehingga masalah terorisme cepat tertanggulangi. Koordinasi antar instansi harus dimaksimalkan agar tidak terkesan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Jadi saling mengisi dan menutupi kelemahan di masing-masing instansi.

Santi Pujirahayu  
Jl Raya Tajur  
Kota Bogor, Jawa Barat

### Ganyang Tindak Korupsi di Elite Partai Politik

Ketidpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang bermain kotor kian menjadi jelas, dengan terkuaknya kasus suap Sekretaris Menpora Wafid Muharam pada proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Ternyata menyeret pula sejumlah elite Partai Demokrat dan partai politik besar lainnya, yang eksis di DPR. Kendati keterlibatan para politisi itu masih perlu ditelusuri lebih jauh kebenarannya, paling tidak pengakuan awal tersangka penyusap Rosalina Manulang menjadi pengakuan budaya bahwa politisi dan parpol terbiasa melakukan praktik percaloan proyek-proyek pemerintah adalah benar adanya. Tuduhan miring bahwa politisi dan parpol merupakan aktor-aktor korupsi di republik ini makin tak terbantahkan.

Komentar pengamat politik benar adanya, bahwa parpol identik dengan korupsi. Bahkan, ada partai politik yang selama ini menjual isu antikorupsi ternyata tak ada bedanya dengan parpol lain yang sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi (mudah-mudahan tidak). Bisa dikatakan bahwa sebagian partai politik telah terjerat tindak korupsi, sekalipun PKS. Yang selama ini mencitrakan diri sebagai partai yang bersih, belakangan terperangkap dalam sejumlah kasus mulai dari perkara Misbahun hingga daging sapi impor. Kasus Miranda Gultom yang menjerat sejumlah politisi Golkar, PDI-P, dan PPP bisa disebut pula sebagai bukti. Belum lagi kasus-kasus yang masih bersifat dugaan seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan terakhir kasus Muhamad Nazrudin, dan kasus lainnya.

Dengan pola-pola seperti ini, mustahil masyarakat Indonesia berharap korupsi dapat diberantas dari bumi Indonesia. Para kader yang merasa mendapat restu tidak sungkan-sungkan lagi merampok uang rakyat. Bagi mereka mandat itu adalah berkat yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk ikut menebalkan kantong pribadi. Karena itu, selama parpol yang menjadi salah satu pondasi sistem bernegara masih hidup dengan budaya tersebut, maka jangan harap korupsi bisa diberantas.

Dwi utami

Jl Caringin Raya 732, Sasak Panjang-Bogor

## Nazaruddin: Uang Sampai ke Menteri

dari halaman 1

Terkait pernyataan tersebut, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jasim mengatakan akan menganalisis terlebih dahulu pengakuan tersebut. "Ya dianalisis terlebih dulu. Jika hanya bicara mudah," kata Jasim melalui pesan singkat kepada SP, Kamis (13/10) pagi.

Tentang kemungkinan Andi Mallarangeng dipanggil untuk ketiga kalinya, Jasim menegaskan hal tersebut bergantung keperluan tim penyidik KPK.

"Contoh, dulu Nazaruddin tidak dipanggil pun, bila bukti sudah cukup maka ditetapkan menjadi tersangka. Yang penting itu alat bukti yang cukup, bukan masalah panggilan-memanggil," katanya.

## Cerita Angelina Sondakh

Pada kesempatan itu, Nazaruddin juga menyampaikan bahwa informasi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menerima uang proyek pembangunan wisma atlet berasal dari Angelina Sondakh. "Itu Ibu Angie yang cerita (mengenai Anas menerima uang, Red)," katanya.

Selain itu, Nazaruddin juga berjanji akan bicara apa adanya di hadapan penyidik KPK, termasuk mengenai aliran dana dari proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. "Saya akan bicara apa adanya. Saya akan menjelaskan semua tentang siapa yang terima uang. Jangan dikorbakan dari politiknya," ungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini.

Hal senada juga dikatakan kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif. Menurutnya, dalam pemeriksaan Rabu (12/10), kliennya telah mengatakan semua fakta yang diketahui. "Nazaruddin tidak akan bungkam. Justru kita yang meminta supaya Nazaruddin diperiksa sebagai tersangka," katanya.

Sedangkan anggota penasihat hukum Nazaruddin dari kantor hukum OC Kaligis, Boy Afrian Bondjol mengatakan pemeriksaan yang dilakukan KPK kemarin difokuskan pada kasus wisma atlet. Nazaruddin telah memberberikan apa saja yang diketahuinya terkait proyek tersebut.

"Dia menceritakan apa yang dia ketahui mengenai wisma atlet. Tetapi, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Yang disayangkan ke-

napa baru saat ini Nazaruddin diperiksa," katanya ketika dihubungi SP di Jakarta, Kamis (13/10).

Menurutnya, kliennya dicecar pertanyaan siapa yang menerima dana dalam proyek wisma atlet. Kemudian Nazaruddin menyebutkan beberapa nama yang sudah diperiksa oleh KPK, antara lain anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, Wakil Ketua Banggar Mirman Amir, dan Menpora Andi Mallarangeng.

Dia menegaskan, keinginan Nazaruddin saat ini hanya satu yakni, jangan dijadikan korban. "Dia cuma minta jangan dijadikan korban. Katakanlah terlibat, tetapi masih ada nama-nama lain yang juga terlibat. Yang jelas kalau kasus wisma atlet, dia tidak terlibat karena dia tidak menerima uang. Tetapi dia tahu siapa yang menerima uang," kata Boy.

Seperti diketahui, Nazaruddin sempat menyebut empat sumber uang yang digunakan oleh Anas Urbaningrum untuk memengaruhi pemilihan ketua umum Partai Demokrat saat kongres di Bandung awal 2010. Pertama, dari proyek pembangunan stadion Hambalang yang diserahkan oleh pengusaha bernama Mahfud langsung ke mantan Wakil Direktur Perma Grup, Yulianis. Kedua, dari proyek e-KTP senilai Rp 40 miliar langsung dari pengusaha bernama Andi ke Yulianis.

Ketiga, berasal dari proyek bantuan operasional sekolah (BOS) yang diserahkan oleh pengusaha langsung ke Yulianis. Keempat, proyek pembangkit Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Riau yang dimenangkan oleh PT Rekin dan pembangkit listrik di Kalimantan Timur yang diserahkan oleh Mahfud melalui PT Adhi Karya.

Nazaruddin juga pernah mengungkapkan Angelina Sondakh dan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, I Wayan Koster menerima uang Rp 9 miliar terkait proyek wisma atlet. Kemudian, keduanya menyerahkan Rp 8 miliar kepada salah satu pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir. Selanjutnya, Mirwan menyerahkan uang tersebut ke pimpinan Banggar lainnya, Anas Urbaningrum, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Jafar Hafshah. [ECS/N-8]